BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Prinsip-prinsip Penafsiran al-Qur'an

Ada sejumlah prinsip-prinsip penafsiran yang perlu diperhatikan dalam memahami al-Qur'an. Sebagai dokumen untuk manusia, al-qur'an haruslah selalu dapat memberikan bimbingan kepada manusia dalam hidup dan kehidupan mereka. dengan kata lain, al-Qur'an merupakan sumber makna dan nilai mereka. Inilah sebabnya, Kitab Suci al-Qur'an mengklaim dirinya sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang bathil sebagaimana termaktub dalam ayat ke-185 dari surat al-Baqarah berikut:

اَلْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang bathil)

Sebagai petunjuk Allah yang jelas dan berkaitan bagi manusia pesan-pesan al-Qur'an --termasuk pesan moral-- bersifat universal. Karenanya untuk memahami pesan moral al-Qur'an, kita tidak bisa menafsirkannya secara atomistik dan parsial serta terlepas dari konteks kesejarahan dan kesusastraannya[1], demi membela sudut

---

1.lihat tulisan Ali al-Usiy "Metodologi Penafsiran al-Qur'an: sebuah Tinjauan Awal" dalam *Al-Hikmah*, No.4, Nov.-Febr 1992,Bandung, h.5-26. Dalam artikel ini diungkap bias-bias teologis dan ideologis dalam menafsirkan al-Qur'an karena memahami hanya pada sudut pandang tertentu secara parsial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandang tertentu. Memahami konteks kesejarahan pra-Qur'an penting dilakukan karena al-qur'an merupakan respon terhadap situasi-situasi keagamaan, keyakinan, pandangan dunia, dan adat-istiadat masyarakat Arab sebelum al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an diwahyukan dalam situasi kesejarahan yang konkret. Ia merupakan respon Ilahi terhadap situasi Arabia ketika ia diturunkannya. Respon tersebut terekam di berbagai tempat dalam kitab suci al-Qur'an. Oleh karena itu, prinsip mempelajari situasi kesejarahan ini merupkan unsur penting dalam memahami al-Qur'an.

Pemahaman konteks kesejarahan pra-Qur'an dan pada masa al-Qur'an diturunkan, menjanjikan beberapa manfaat praktis. Pertama, pemahaman itu memudahkan kita mengi-dentifikasi gejala-gejala moral dan sosial di masyarakat Arab ketika itu, sikap al-Qur'an terhadapnya, dan caea al-Qur'an memodifikasi atau mereformasi gejala itu hingga sejalan dengan pandangan-dunia al-Qur'an. Kedua, kesemuanya itu dapat dijadika pedoman bagi umat Islam dalam mengidentifikasi dan menangani problem-problem yang mereka hadapi. Ketiga, pemahaman tentang konteks kesejarahan pra-Qur'an dan masa al-Qur'an dapat menghin-darkan kita dari praktek-praktek pemaksaan prakonsepsi dalam penafsiran[2].

Pemahaman terhadap konteks kesejarahan al-Qur'an, menurut Fazlur Rahman, sangat bermanfaat untuk menyari-

---

2.Taufik Adnan Amal, *tafsir Kontekstual al-qur'an: Sebuah Kerangka Konseptual*, Mizan, Bandung, 1990, h.51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang mendasari ketentuan-ketentuan al-Qur'an, atau menentukan secara akurat alasan-alasan yang ada di balik pernyataan-pernyataan, komentar-komentar dan perintah-perintah al-Qur'an[3].

Al-Qur'an baik secara eksplisit maupun implisit selalu menyediakan alasan-alasan di balik solusi-solusi dan ketetapan-ketetapan terhadap masalah-masalah historis yang spesifik dan konkret, yang darinya dapat dideduksi prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip ini, menurut Rahman seperti kutipan di bawah ini, harus digeneralisasikan untuk kemudian digunkan dalam memformulasikan pranata-pranata Islami yang berorientasi kekinian:

> Seseorang harus menggeneralisasikan berdasarkan penanganan al-Quran terhadap kasus-kasus aktual --dengan mempertimbangkan secara cermat situasi historis yang ada ketika itu-- karena meskipun ditemukan beberapa pernyataan atau prinsip umum, namun hal ini untuk sebagian besarnya tertanam dalam penanganan-penanganan konkret terhadap masalah-masalah aktual. Kesimpulan bersih dari pertimbangan ini adalah sebagai berikut: Dalam membangun perangkat hukum dan pranata Islam, apa pun yang sejati dan dapat bertahan (*viable*), harus ada dua gerakan ganda: Pertama, seseorang harus bergerak dari penanganan-penanganan kasus konkret al-Qur'an --dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial yang penting dan relevan pada waktu itu (yakni pada masa waktu al-Qur'an diturunkan)-- kepada prinsip-prinsip umum yang di atasnya keseluruhan ajaran al-Qur'an berpusat. Kedua, dari perangkat yang umum ini harus ada

---

3.Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, Pustaka, bandung, 1985, h.18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu gerakan balik kepada legislasi spesifik, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial yang relevan pada masa sekarang ini.[4]

Dengan demikian dalam menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual kita harus terlebih dahulu bisa memahami garis besar dari tujuan al-Qur'an. Fazlur Rahman menyebut tujuan al-qur'an tersebut adalah menegakkan suatu tata sosio-moral yang adil, egaliter dan berlandaskan iman serta dapat bertahan di muka bumi. Perhatian utama al-qur'an adalah pada manusia dan itulah sebabnya al-Qur'an selalu bersifat praktis.[5]

Beberapa langkah terapan penafsiran al-qur'an dapat dilakukan dengan cara: 1.memilih obyek penafsiran yang menjadi tema bahasan, 2.mengkaji tema tersebut dalam konteks kesejarahan pra-Qur'an dan pada masa al-qur'an, 3.mengkaji respon al-qur'an sehubungan dengan tema itu dalam urutan kronologisnya, dengan memberikan konteks sastra ayat-ayat al-Qur'an yang ditujuk; 4.mengaitkan pembahasan tema tersebut dengan tema lain yang relevan; 5.menyimpulkan kehendak atau tujuan-tujuan al-qur'an sehubungan dengan tema tersebut lewat kajian-kajian di atas; dan 6.menafsirkan ayat spesifik yang berkaitan dengan tema berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari kajian-kajian di atas[6].

4.Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Mizan, Bandung, 1990, h.158.

5.*Ibid*, h.157. lihat juga Amal,"Tafsir Kontekstual...", *op. cit.*, h.60.

6.Taufik A. Amal,"Tafsir ...",*op. cit.*, h.63-64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B.Kedudukan Etika

Secara natural manusia selalu ingin hidup bersama manusia lainnya atau hidup dalam masyarakat. Hasrat untuk hidup bersama-sama dengan manusia lainnya atau hidup dalam masyarakat itu telah menjadi pembawaan alamiahnya dan merupakan suatu keharusan sebagai akibat organisme manusia untuk melangsungkan dan mempertahankan hidupnya.

Setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan. Kepentingan-kepentingan mereka masing-masing itu ada yang sama, ada yang berbeda dan ada yang bertentangan. Adanya perbedaan dan pertentangan kepentingan-kepentingan itu dapat menimbulkan bentrokan-bentrokan dan perselisihan-perselisihan, dan apabila dibiarkan begitu saja akan membawa kekacauan dalam masyarakat.

Supaya setiap anggota masyarakat di dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan tentram, aman dan damai tanpa mendapat gangguan dari siapapun, maka perlu adanya tata (orde) yaitu aturan-aturan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia bagaimana seharusnya ia bertingkah laku, apa yang diperintahkan, dilarang dan apa yang diperbolehkan dilakukan, dalam hidup bersama atau dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dengan demikian kepentingan-kepentingan masing-masing anggota masyarakat dilindungi dan dijamin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tata aturan-aturan yang demikian ini disebut norma atau kaidah. Kaidah-kaidah itu menjadi suatu gejala sosial yakni sesuatu gejala yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah itu ialah agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum. Tidak jarang terjadi, bahwa suatu kepentingan manusia sekaligus dilindungi oleh keempat kaidah itu, misalnya perbuatan menganiaya dan membunuh. Akan tetapi antara kaidah-kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan di satu pihak dan kaidah hukum di lain pihak terdapat perbedaan yaitu yang terutama ialah bahwa kaidah hukum itu mempunyai sanksi tegas dan nyata yang dijatuhkan oleh penguasa atau aparatur negara yang berwenang.

Kaidah-kaidah sosial lainnya tidak dapat dilaksanakan oleh penguasa atau aparatur negara itu. Kaidah agama yang memberi sanksi adalah Tuhan, kaidah kesusilaan yang memberi sanksi batin si pelaku yang berada di dalam dirinya, dan kaidah kesopanan yang memberi sanksi adalah masyarakat atau sekelompok anggota masyarakat yang bersangkutan[7].

C. Relasi Kaidah, Nilai, Moral dan Etika

Istilah nilai di dalam bidang filsafat dipakai

7.Abdul Chalim Muhammad, "Kode Etik Kedokteran Sebagai Kaidah Sosial" dalam makalah *Seminar Sehari Kode Etik Kedokteran Dalam Perspektif Syari'ah*, Surabaya, h.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*). Menilai berarti *menimbang*, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan nilai dapat mengatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius. Hal ini dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia, yaitu jasmani, cipta, rasa, karsa dan kepercayaan. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, benar (nilai kebenaran), indah (nilai estetis), baik (nilai moral/etis), religius (nilai agama).

Seperti yang diketengahkan Darmodiharjo bahwa nilai adalah sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan betingkah laku, baik disadari maupun tidak[8] disadari. Berbeda dengan fakta yang dapat dobservasi dengan teknik empiris, maka tidak demikian halnya dengan nilai, karena nilai berkaitan dengan cita-cita, keinginan, dan harapan, dan segala sesuatu pertimbangan internal (batiniah) manusia. Nilai, dengan demikiqan tidak konkrit dan pada dasarnya bersifat subjektif.

8.Darji Darmodiharjo, Sidarta, M.Hum, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama,1995, h.232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nilai yang abstrak dan subjektif tersebut, agar dapat lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, perlu lebih dikonkritkan lagi serta dibentuk menjadi lebih objektif. Wujud yang lebih konkrit dan objektif dari nilai ini adalah norma. Norma hukum adalah norma yang paling kuat karena dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh kekuasaan eksternal (penguasa) dibandingkan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah sosial lainnya.

Nilai dan norma ini selanjutnya berkaitan erat dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang amat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Maka moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Di sini lalu kita memasuki wilayah norma sebagai sikap dan tingkah laku manusia. Etika juga mempunyai kaitan yang erat dengan filsafat hukum. Sama dengan istilah filsafat (*philos* dan *sophia*, yang artinya cinta pada kebijaksanaan), secara etimologis, etika juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* atau *ta etika*, yang artinya watak kebiasaan. Seringkali orang menyamakan istilah etika dengan ajaran moral. Istilah yang terakhir ini juga berasal dari bahasa Yunani, yakni *mos* (jamaknya *mores*), yang juga bermakna sama dengan *ethos*.

Kendati secara etimologis bermakna sama, dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah tersebut tidaklah identik. Etika ialah teori tentang laku-perbuatan manusia, dipandang dari segibaik dan buruk, sepanjang yang dapat dijangkau oleh akal manusia. Sedangkan moral dalam bahasa Indonesia disebut *susila*. Yang dimaksud dengan *moral* ialah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Jadi sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang umum diterima oleh kesatuan sosial atau lingkungan tertentu.

Dengan demikian jelaslah hubungan antara etika dan moral. Etika lebih banyak bersifat teori sementara moral bersifat praktek. Etika membicarakan bagaimana seharusnya, yang kedua bagaimana adanya. Etika menyelidiki, memikirkan dan mempertimbangkan yang baik dan yang buruk, moral meyatakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu. Etika memandang laku-perbuatan manusia secara universal, moral secara lokal. Moral menyatakan ukuran sedangkan etika menjelaskan ukuran itu. Moral sesungguhnya dibentuk oleh etika. Ia muara atau buah dari etika[9].

Setiap orang memiliki moralitasnya sendiri-sendiri, tetapi tidak demikianhalnya dengan etika. Tidak semua orang perlu melakukan pemikiran yang kritis terha-

---

9.Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat Pengantar Kepada Teori Nilai*, Bulan Bintang, Jakarta,1973, h.483.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dap moralitas. Bisa saja yang bersangkutan mengikuti saja pola moralitas yang ada di masyarakat tanpa perlu merefleksikannya secara kritis. Etika tidak berwenang menetapkan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh manusia. Wewenang ini dipandang berada di tangan pihak-pihak yang memberikan ajaran moral. Hal ini adalah kekurangan dari etika dibandingkan dengan ajaran moral. Sekalipun demikian, etika dapat mengerti mengapa, dan atas dasar apa manusia harus hidup menurut norma-norma tertentu. Hal tertentu inilah kelebihan etika dibandingkan ajaran moral.

Frans Magnis-Suseno mengibaratkan ajaran moral sebagai buku petunjuk tentang bagaimana kita harus memperlakukan sepeda motor kita dengan baik, sedangkan etika memberikan kita pengertian tentang struktur dan teknologi sepeda motor sendiri[10]. Dengan demikian, etika tidak serta merta membuat manusia menjadi baik karena hal tersebut adalah tugas dari ajaran moral. Tugas etika adalah memberikan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis[11]. Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Etika membebani kita dengan

---

10.Frans Magnis-Suseno, *Etika dasar: Masalah-Masalah pokok filsafat Moaral*, Kanisius, Jakarta, 1991, h.14

11.*ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban moral, yang berbeda dengan kewajiban norma hukum, kewajiban moral ini tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk dipaksakan penerapannya. Norma moral bersifat otonom, bukan heteronom, sehingga penegakannya tidak dapat dipaksakan melalui daya pemaksa eksternal seperti oleh pemerintah. Itulah sebabnya, selalu ada kebebasan bagi pemilik moralitas itu untuk berbuat atau tidak berbuat. Kebebasan ini dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, kebebasan yang kita terima dari orang lain, yang disebut kebebasan sosial. Kedua, kebebasan dalam arti kemampuan kita untuk menentukan tindakan kita sendiri, yang disebut dengan kebebasan eksistensial[12]. Kebebasan sosial ini selalu dibatasi oleh orang lain. Pembatasannya dapat berupa pembatasan, yaitu pembatasan jasmani, pembatasan rohani dan pembatasan perintah dan larangan. Pembatasan Jasmani (fisik) berkenaan dengan adanya paksaan dari orang lain secara fisik, misalnya dalam hal terjadi nya pemerkosaan. Pembatasan rohani (psikis) berkaitan dengan tekanan batin yang diberikan oleh orang lain. Sedangkan pembatasan pemerintah dan larangan, antara lain mewujud dalam undang-undang, pemerintah atau larangan orang tua, atasan, dan guru.

Kebebasan eksistensial berakar dalam kebebasan ru-

---

12. *ibid*, h.22-32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rohani manusia, yaitu dalam penguasaan terhadap batinnya, pikirannya, dan kehendaknya. Kebebasan ini terungkap dan mencapai realitas sepenuhnya dalam tindakan yang berakar dalam kebebasan batin, tetapi terujud dalam dimensi lahiriah (kebebasan jasmani), yakni kemampuan manusia untuk menentukan kemampuan gerak tubuhnya sebagai ungkapan kehendaknya yang bebas. Kebebasan eksistensial ini hanya dapat bergerak sejauh tidak dihalangi orang lain, yang kembali membawa kita kepada pengertian kebebasan sosial.

Magnis-Suseno mengingatkan agar dalam membicarakan tentang kebebasan, perlu dibedakan kebebasan mana yang sedang dibicarakan, apakah kebebasan sosial atau eksistensial. Dalam hal membicarakan tentang kebebasan sosial, secara hakiki kebebasan itu perlu dibatasi oleh pelbagai pihak yang berwewenang. Kendati demikian, pembatasan itu perlu dipertanggungjawabkan, baik alasan maupun caranya. Pembatasan ini juga harus normatif. Hanya kalau orang tidak mau menerima pembatasan ini secara baik, pembatasan-pembatasan yang telah diberi status hukum, boleh juga dipaksakan secara fisik.

Sedangkan kebebasan eksestensial sebagai kemampuan manusia untuk menentukan dirinya berkembang dan menjadi kuat semakin orang bersedia untuk bertanggun jawab. dan sebaliknya, semakin orang menolak untuk bertanggung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab, semakin juga sempit dan lemah kepribadiannya, jadi semakin berkurang juga kebebasannya untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan (eksistensial) yang bertanggung jawab menyatakan diri dalam pola moralitas yang otonom. Manusia bermoralitas otonom melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya bukan karena takut atau merasa tertekan, melainkan karena ia sendiri sadar, jadi menyadari nilai dan makna serta perlunya kewajiban dan tanggung jawabnya itu[13].

Kesatuan pendapat moral sering sulit untuk dicapai. Magnis-Suseno menyebutkan tiga alasan mengapa hal itu dapat terjadi. Pertama, masalah moral yang dihadapi oleh berbagai bidang seringkali sangat kompleks. Kedua, kita sering menghadapi masalah tersebut secara tidak rasional dan objektif, melainkan secara emosional dan hanya dari segi kepentingan pribadi. Ketiga, kita sering pula tidak bersedia untuk bertindak dengan baik, adil dan jujur[14]

Dari tiga alasan di atas, tampak bahwa hanyqa orang yang memiliki kepribadian yang kuat dan matang yang dapat mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan demikian juga baru akan lahir apabila ada kebebasan. dengan perkataan lain, kesatuan pendapat

---

13. *ibid*, h.46
14. *ibid*, h.75-93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

moral hanya mungkin dicapai apabila kita memutuskannya berdasarkan suara hati kita.

Suara hati tentu saja dapat keliru. Kekeliruan ini biasanya terjadi karena ia tidak didukung oleh pandangan-pandangan moral yang benar. Itulah sebabnya, suara hati bersifat terbuka dan mau belajar tentang seluk beluk masalah-masalah yang sedang dihadapi.

D. FUNGSI ETIKA

Etika berusaha memberi petunjuk untuk tiga jenis pertanyaan yang senantiasa kita ajukan, Pertama, apakah yang harus kita lakukan dalam situasi konkret yang tengah dihadapi? Kedua, bagaimana kita akan mengatur pola koek-sistensi kita dengan orang lain? Ketiga, akan menjadi manusia macam apa kita ini. Dalam konteks ini, etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dalam mengelolakehidupan ini tidak sampai bersifat tragis[15]. Etika berusaha mencegah tersebarnya *fracticida* yang secara legendaris dan historis mewarnai sejarah hidup manusia.

Jika tiga pernyataan itu disarikan, sampailah pada suatu fungsi utama etika, sebagaimana disebutkan oleh Magnis-Suseno, yaitu untuk membantu kita mencari orienta

---

15.Darji Darmodiharjo, *op. cit.*, h.236-237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

si secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Di sini terlihat bahwa etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Pengertian pemikiran perlu dicari dengan alasan:(1) Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang mana;(2) Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional; (3) adanya pelbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup, yang masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia hidup, dan (4) Etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka, di lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu[16].

Jika dikatakan fungsi etika adalah untuk memberikan orientasi. Persoalan yang bisa muncul adalah bagaimana dengan agama? Tentu saja, etika tidak dapat menggantikan agama. Akan tetapi, agama sendiri memerlukan keteram-

---

16.Frans Magnis-Suseno, *op. cit.*, h.15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pilan etika agar dapat memberikan orientasi dan bukan sekedar indoktrinasi. Franz Magnis-Suseno menyatakan ada empat alasan yang melatar belakanginya:

1. Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dari moralitas agama, seperti mengapa Tuhan memerintahkan ini, bukan itu,
2. Etika membantu dalam mengintrepretasikan ajaran agama yang saling bertentangan
3. Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia, seperti soal bayi tabung dan euthanasia,
4. etika dapat membantu mengadakan dialog antar agama karena etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu[17].

Alasan terakhir tersebut sekaligus membedakan antara etika dan agama. Etika dengan pertimbangan nalarnya, terbuka bagi setiap orang dari semua agama. Sebaliknya, ajaran hanya terbuka bagi mereka yang mengakui wahyu yang disampaikan oleh agama tersebut.

Secara sistimatis, etika dibedakan menjadi etika umum dan etika khusus. Etika khusus selanjutnya dibedakan lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Etika Umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral,

---

17. *ibid*, h.5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara nurani. Di lain pihak, etika khusus menerapkan prisnsip-prinsip dasar dari moral itu padaa masing-masing bidang kehidupan manusia. Etika khusus yang individual memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri, dan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Dua jenis etika khusus tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Etika sosial ini banyak sekali pembidangannya, seperti etika keluarga, etika politik, etika lingkungan hidup, kritik idelogi-ideologi, dan etika profesi[18].

18.Darji Darmodiharjo,*op. cit.*, h.244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id